# MITIGASI BENCANA BANJIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Herly Ameylia
NPP. 33.0750
*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*
Email: herlyamoyliaa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Agus Supriadi Harahap, M.Si.
Email: agusharahap@ipdn.ac.id

## ABSTRACT

**Problem Statement (Research Gap):** Flood mitigation in Barito Timur Regency has tended to rely on structural and emergency approaches, while Dayak Bakumpai local wisdom has not been systematically integrated into formal mitigation policies. The main problem lies in the gap between recurring flood impacts and the limited use of community-based local knowledge for prevention, preparedness, and early warning **Purpose:** This study aims to analyze flood disaster mitigation based on local wisdom in Barito Timur Regency, Central Kalimantan Province. **Method:** This study used a qualitative method with a thematic approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving 8 informants consisting of customary figures, village government officials, flood-affected community members, Kawan Kades disaster volunteers, and the Regional Disaster Management and Fire Agency. **Result:** The study found that local wisdom is reflected in baharagu or mutual cooperation, customary norms prohibiting tree cutting around rivers and water sources, river cleanliness practices, natural sign interpretation, traditional stilt houses, and the transformation of local values through the Kawan Kades volunteer program. However, implementation is constrained by declining intergenerational transmission, low public awareness, limited waste management facilities, weak cross-sector coordination, limited human resources, and the dominance of emergency-oriented disaster management. **Conclusion:** Local wisdom remains relevant as non-structural flood mitigation, but it needs stronger integration into regional policies, community education, customary institution involvement, and the strengthening of BPBD and Kawan Kades coordination.

**Keywords:** Disaster mitigation; Flood; Local government; Local wisdom

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):** Mitigasi banjir di Kabupaten Barito Timur masih cenderung bertumpu pada pendekatan struktural dan penanganan darurat, sementara kearifan lokal masyarakat Dayak Bakumpai belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan mitigasi formal. Permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara dampak banjir yang berulang dan belum optimalnya pemanfaatan pengetahuan lokal masyarakat untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi bencana banjir berbasis kearifan lokal di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tematik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan 8 informan yang terdiri atas tokoh adat, pemerintah desa,

masyarakat terdampak banjir, relawan Kawan Kades, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal tampak dalam praktik baharagu atau gotong royong, norma adat larangan menebang pohon di sekitar sungai dan sumber air, kebiasaan menjaga kebersihan sungai, pengetahuan membaca tanda alam, pembangunan rumah panggung, serta transformasi nilai lokal melalui program Kawan Kades. Namun, penerapannya masih menghadapi penurunan pewarisan nilai antargenerasi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengelolaan sampah, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, dan dominasi penanganan darurat. **Kesimpulan:** Kearifan lokal masih relevan sebagai mitigasi banjir non-struktural, tetapi perlu diperkuat melalui integrasi kebijakan daerah, edukasi masyarakat, pelibatan lembaga adat, serta penguatan koordinasi BPBD dan Kawan Kades.

**Kata kunci:** Banjir; Kearifan Lokal; Mitigasi Bencana; Pemerintah Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, mitigasi bencana tidak hanya menjadi urusan teknis kebencanaan, tetapi juga bagian dari fungsi pemerintahan untuk melindungi, melayani, dan memberdayakan masyarakat. Labolo (2017) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan berkaitan dengan bagaimana kewenangan negara dijalankan untuk mengatur dan melayani masyarakat. Sejalan dengan itu, Khairi (n.d.) menekankan pentingnya hubungan pusat dan daerah dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kebutuhan wilayah.

Banjir merupakan salah satu ancaman bencana yang sering terjadi pada wilayah dengan curah hujan tinggi, kondisi geografis tertentu, dan kualitas pengelolaan daerah aliran sungai yang belum optimal. Di wilayah Kalimantan, persoalan banjir sangat berkaitan dengan karakter sungai, perubahan tata guna lahan, dan kapasitas mitigasi masyarakat. Anastasya dan Wilantika (2023) menunjukkan bahwa kerawanan banjir pada DAS Barito dapat dianalisis melalui faktor lingkungan dan spasial. Kondisi ini relevan dengan Kabupaten Barito Timur yang memiliki wilayah permukiman di sekitar aliran sungai. Data BPBD Kabupaten Barito Timur menunjukkan bahwa banjir tahun 2023-2024 berdampak pada 3.734 penduduk di 42 desa, dengan ketinggian air mencapai 80 sampai 120 cm serta menimbulkan kerusakan rumah, akses jalan, dan jembatan penghubung antar desa.

Upaya mitigasi banjir di Kabupaten Barito Timur selama ini masih cenderung berfokus pada pendekatan struktural, seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan drainase. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum cukup apabila tidak didukung oleh pendekatan non-struktural berbasis partisipasi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menempatkan mitigasi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana, sedangkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2024 menjadi dasar penguatan rencana penanggulangan bencana daerah. Dalam konteks pemerintahan, Dione dan Faradina (2020) menegaskan bahwa koordinasi dan sistem informasi daerah diperlukan agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih terpadu. Hal ini juga penting dalam mitigasi banjir, terutama ketika kebijakan formal perlu disesuaikan dengan pengetahuan masyarakat lokal.

Kabupaten Barito Timur memiliki potensi kearifan lokal masyarakat Dayak Bakumpai yang dapat mendukung mitigasi banjir. Kearifan tersebut tercermin dalam nilai baharagu atau gotong royong, larangan menebang pohon di sekitar sungai dan sumber air, larangan membuang

sampah ke sungai, pengetahuan membaca tanda alam, serta pola permukiman berupa rumah panggung. Novrianti et al. (2019) menunjukkan bahwa kearifan lokal dan pendidikan berwawasan lingkungan dapat memperkuat pencegahan bencana di Kalimantan Tengah. Dede et al. (2024) juga menjelaskan bahwa pengetahuan lokal di Indonesia banyak diwariskan secara lisan melalui tradisi, rumah tradisional, pranata adat, dan praktik sosial yang berhubungan dengan lingkungan dan bencana. Oleh karena itu, mitigasi banjir berbasis kearifan lokal perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi kebijakan daerah.

Dalam perspektif perlindungan masyarakat, Eviany dan Sutiyo (2023) menjelaskan bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan memerlukan kesiapsiagaan masyarakat serta dukungan kelembagaan pemerintah. Sejalan dengan itu, N. A. Putri et al. (2024) menunjukkan bahwa mitigasi bencana berbasis kearifan lokal pada masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar berjalan melalui pendekatan partisipatif, peran kelembagaan adat, dan tokoh adat sebagai penggerak lapangan. Pandangan tersebut memperkuat pentingnya menempatkan kearifan lokal Dayak Bakumpai sebagai modal sosial dalam mitigasi banjir di Kabupaten Barito Timur.

Perencanaan dan penganggaran daerah menjadi penting agar kearifan lokal tidak berhenti sebagai nilai sosial, tetapi dapat masuk ke dalam program pemerintah. Sinurat dan Panjaitan (2017) menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah merupakan instrumen untuk menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan. Dalam mitigasi banjir, hal ini berarti nilai lokal, kapasitas relawan desa, serta pengetahuan masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, kegiatan edukasi, dan penguatan kelembagaan. Selain itu, Rowa (2022) menjelaskan bahwa organisasi pemerintahan perlu dipahami dari sisi teori dan praktik agar fungsi koordinasi, pembagian peran, dan pelaksanaan program dapat berjalan efektif.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada belum selarasnya antara tingginya risiko banjir berulang di Kabupaten Barito Timur dan belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal Dayak Bakumpai dalam sistem mitigasi formal. Banjir tahun 2023-2024 berdampak pada 3.734 penduduk di 42 desa, tetapi penanganan yang dilakukan masih lebih dominan pada pembangunan fisik dan respons darurat. Di sisi lain, masyarakat memiliki nilai baharagu, norma menjaga sungai, larangan menebang pohon di sekitar sumber air, pengetahuan membaca tanda alam, dan tradisi rumah panggung yang berpotensi menjadi mitigasi non-struktural. Sejumlah penelitian telah membahas local and indigenous knowledge dalam pengurangan risiko bencana, tetapi belum banyak yang secara spesifik mengkaji hubungan antara kearifan lokal Dayak Bakumpai, peran BPBD, pemerintah desa, lembaga adat, dan relawan Kawan Kades dalam mitigasi banjir di Kabupaten Barito Timur. Hadlos et al. (2022) menyebutkan bahwa local and indigenous knowledge telah diakui dalam kerangka pengurangan risiko bencana, namun pemanfaatannya dalam kebijakan dan praktik masih sering terfragmentasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan dengan menjelaskan permasalahan banjir, bentuk kearifan lokal, hambatan penerapan, serta peluang integrasinya ke dalam kebijakan mitigasi daerah.

### 1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena banjir di Kabupaten Barito Timur merupakan peristiwa berulang yang berdampak langsung pada keselamatan, penghidupan, dan infrastruktur masyarakat. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah berisiko terus mengandalkan pendekatan struktural dan penanganan darurat tanpa memahami potensi sosial budaya yang telah dimiliki masyarakat. Padahal, kearifan lokal dapat menjadi sumber pengetahuan yang kontekstual, murah, mudah diterima masyarakat, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dasar empiris bagi BPBD, pemerintah desa, dan lembaga

adat dalam menyusun strategi mitigasi yang lebih partisipatif, adaptif, dan sesuai karakteristik sosial masyarakat Dayak Bakumpai.

### 1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas kearifan lokal, pengetahuan lokal, dan mitigasi bencana. Obi et al. (2021) meneliti pengetahuan lokal masyarakat pesisir Nigeria dalam pengendalian banjir dan menemukan bahwa praktik tersebut memiliki efektivitas sebesar 61,2 persen dalam pengurangan risiko banjir, sehingga perlu diintegrasikan dengan strategi pengelolaan banjir modern. Hadlos et al. (2022) melalui systematic literature review menjelaskan bahwa local and indigenous knowledge mencakup pengetahuan, praktik, dan strategi masyarakat untuk bersiap, memitigasi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana, tetapi masih memerlukan integrasi yang lebih kuat dengan pengetahuan ilmiah dan kebijakan publik.

Dede et al. (2024) melakukan kajian mengenai bencana, lingkungan, dan indigenous knowledge di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan lokal masyarakat Indonesia tampak melalui tradisi lisan, rumah tradisional, alat hidup, zonasi wilayah, dan kelembagaan adat yang berhubungan dengan pengalaman menghadapi bencana. Markolinda et al. (2025) meneliti pengetahuan lokal masyarakat Mentawai dalam mitigasi bencana dan ancaman iklim. Temuannya menunjukkan bahwa masyarakat mengenali tanda alam, ritual lokal, dan kentongan sebagai bagian dari kesiapsiagaan, namun penerapan pengetahuan lokal masih perlu dukungan pendidikan, fasilitas, teknologi, dan kebijakan budaya. Omoruyi et al. (2025) mengembangkan model pengurangan risiko banjir berbasis integrasi pengetahuan lokal dan sistem peringatan dini modern. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah lokal dan masyarakat untuk menggabungkan indigenous knowledge dengan sistem peringatan dini formal.

Dalam konteks nasional, Putri (2022) menegaskan bahwa local knowledge, local wisdom, dan local genius dapat menjadi mitigasi non-struktural yang efektif apabila diakui dalam kebijakan. Rusmaniah et al. (2025) menemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk mengembangkan strategi mitigasi banjir melalui tanda alam, apar-apar, dan tradisi lokal. Shofwan et al. (2021) menunjukkan bahwa masyarakat tradisional Kampung Air Mantuil melakukan mitigasi melalui penataan bangunan, infrastruktur lokal, dan pola tata ruang. Sukma et al. (2024) menyimpulkan bahwa penggabungan pengetahuan tradisional dan strategi modern dapat menghasilkan solusi mitigasi banjir yang lebih holistik. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menempatkan masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Timur sebagai konteks empiris dan menghubungkannya dengan peran kebijakan daerah, BPBD, pemerintah desa, dan relawan Kawan Kades.

### 1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada perbedaan fokus, lokus, dan kedalaman analisis dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian Obi et al. (2021) berfokus pada efektivitas indigenous flood control di masyarakat pesisir Nigeria, Hadlos et al. (2022) menyusun kajian sistematis mengenai local and indigenous knowledge dalam pengurangan risiko bencana, Dede et al. (2024) mengkaji pengetahuan lokal Indonesia secara umum, Markolinda et al. (2025) meneliti masyarakat Mentawai, sedangkan Omoruyi et al. (2025) mengembangkan model integrasi pengetahuan lokal dan sistem peringatan dini di Afrika Selatan. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menempatkan masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Timur sebagai lokus empiris, menganalisis kearifan lokal sebagai mitigasi non-struktural banjir, serta menghubungkannya dengan peran BPBD, pemerintah desa, lembaga adat, dan Kawan Kades. Kebaruan lainnya adalah pembahasan mengenai transformasi nilai baharagu dan pengetahuan lokal ke dalam mekanisme

kelembagaan desa, sehingga penelitian ini tidak hanya memotret tradisi budaya, tetapi juga menunjukkan peluang integrasinya dalam tata kelola mitigasi bencana daerah.

### 1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi bencana banjir berbasis kearifan lokal di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tematik. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan nilai, norma, pengetahuan, dan praktik sosial masyarakat yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan konteks alamiah. Sementara itu, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam menggali makna dari data lapangan. Dengan pendekatan tematik, peneliti dapat mengidentifikasi pola makna yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai kearifan lokal dalam mitigasi banjir.

Operasional konsep penelitian mengacu pada kearifan lokal yang mencakup nilai dan norma lokal, pengetahuan lokal, adaptasi masyarakat, dan transformasi nilai lokal (Taufan, 2023). Dimensi nilai dan norma lokal dilihat dari kepedulian dan kebersamaan terhadap lingkungan serta kepercayaan terhadap tradisi atau ritual. Dimensi pengetahuan lokal dilihat dari kemampuan membaca tanda alam, siklus iklim, cuaca, dan pemilihan lokasi hunian. Dimensi adaptasi masyarakat dilihat dari sistem bangunan tradisional, sedangkan transformasi nilai lokal dilihat dari adaptasi nilai lokal ke dalam kebijakan pemerintah daerah.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi lapangan. Penelitian ini tidak menggunakan responden karena pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, sehingga sumber utama data adalah informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam mitigasi banjir berbasis kearifan lokal. Informan penelitian berjumlah 8 orang yang terdiri atas tokoh adat atau tetua kampung sebagai informan kunci, Kepala Desa Muara Palantau, tiga warga terdampak banjir, satu relawan Kawan Kades, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur, serta satu staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Tokoh adat dipilih karena memahami nilai, norma, aturan adat, dan praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah desa dipilih karena mengetahui kebijakan dan kegiatan mitigasi di tingkat desa. Warga terdampak dipilih karena memiliki pengalaman langsung menghadapi banjir. Relawan Kawan Kades dipilih karena berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. BPBD dan staf bidang pencegahan dipilih karena memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Pemilihan informan dilakukan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling agar data yang diperoleh relevan, mendalam, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan kembali informasi kepada informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi tokoh adat, masyarakat, pemerintah desa, relawan, dan BPBD. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Barito Timur, terutama Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, serta Desa Muara Palantau sebagai salah satu lokasi yang memiliki praktik kearifan lokal dalam menghadapi banjir. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada Januari 2026.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi bencana banjir berbasis kearifan lokal di Kabupaten Barito Timur tampak melalui empat dimensi utama, yaitu nilai dan norma lokal, pengetahuan lokal, adaptasi masyarakat, serta transformasi nilai lokal ke dalam kebijakan dan kelembagaan. Keempat dimensi tersebut saling berhubungan karena nilai sosial membentuk perilaku lingkungan, pengetahuan lokal membantu masyarakat membaca risiko, adaptasi fisik mengurangi dampak banjir, dan transformasi nilai lokal memungkinkan praktik masyarakat masuk ke dalam program pemerintah.

### 3.1. Nilai dan Norma Lokal

Nilai dan norma lokal masyarakat Dayak Bakumpai di Desa Muara Palantau berperan sebagai dasar mitigasi banjir yang bersifat preventif. Salah satu nilai utama yang masih dikenal masyarakat adalah baharagu, yaitu bekerja sama atau gotong royong. Ketika tanda banjir mulai muncul, seperti hujan deras, debit sungai meningkat, dan air mulai naik, masyarakat saling membantu memindahkan barang ke tempat aman serta membuat tanggul sederhana dari karung pasir di tepi sungai. Praktik ini menunjukkan bahwa mitigasi tidak selalu dimulai dari teknologi modern, tetapi juga dari solidaritas sosial dan kemampuan masyarakat untuk bertindak bersama.

Norma lokal juga tampak melalui larangan menebang pohon di sekitar sungai dan sumber air. Masyarakat memahami bahwa pohon di tepi sungai berfungsi menjaga kestabilan tanah, mengurangi erosi, dan menahan aliran air. Selain itu, terdapat larangan membuang sampah ke sungai karena sungai dipandang sebagai sumber kehidupan. Larangan tersebut bukan hanya aturan moral, tetapi juga bentuk kontrol ekologis yang berhubungan langsung dengan pencegahan banjir. Temuan ini sejalan dengan Putri (2022) yang menjelaskan bahwa kearifan lokal dapat menjadi mitigasi non-struktural karena membentuk perilaku masyarakat agar selaras dengan lingkungan.

Walaupun nilai dan norma lokal masih ada, penelitian menemukan adanya penurunan kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga lingkungan. Beberapa warga masih membuang sampah rumah tangga ke sungai atau membakarnya di sekitar rumah karena belum tersedia sistem pengelolaan sampah yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai lokal tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri, tetapi perlu didukung oleh fasilitas, edukasi, dan kebijakan desa. Dalam perspektif pemerintahan, Labolo (2017) menegaskan bahwa fungsi pemerintah tidak hanya mengatur, tetapi juga melayani dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan nilai baharagu perlu dihubungkan dengan program desa, edukasi lingkungan, dan dukungan sarana kebersihan.

### 3.2. Pengetahuan Lokal

Pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi banjir terbentuk dari pengalaman hidup yang panjang di sekitar sungai. Banjir tidak dipandang sebagai kejadian yang sepenuhnya tiba-tiba, tetapi sebagai fenomena yang dapat dikenali melalui tanda alam. Masyarakat memperhatikan perubahan debit sungai, intensitas hujan, warna air, arah aliran air, serta pengalaman musim sebelumnya. Pengetahuan tersebut membantu masyarakat memperkirakan waktu untuk memindahkan barang, menyiapkan tempat aman, dan memberi informasi kepada keluarga atau tetangga.

Pengetahuan lokal semacam ini memiliki kemiripan dengan temuan Dede et al. (2024), bahwa pengetahuan lokal di Indonesia sering diwariskan secara lisan dan terhubung dengan pengalaman lingkungan. Hadlos et al. (2022) juga menegaskan bahwa local and indigenous knowledge tidak hanya berupa keyakinan, tetapi mencakup keterampilan dan tindakan mandiri masyarakat dalam mempersiapkan, memitigasi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana. Dalam konteks Barito Timur, pengetahuan membaca tanda alam menjadi bentuk peringatan dini lokal yang dapat melengkapi informasi formal dari pemerintah.

Namun, pengetahuan lokal menghadapi tantangan pewarisan antargenerasi. Generasi muda tidak selalu memahami makna tanda alam atau aturan adat karena perubahan gaya hidup, pendidikan, pekerjaan, dan pengaruh modernisasi. Kondisi ini serupa dengan temuan Markolinda et al. (2025) di Mentawai, bahwa pengetahuan lokal masih dikenal masyarakat, tetapi penerapannya tidak selalu dilakukan secara konsisten dan membutuhkan dukungan pendidikan, fasilitas, serta teknologi. Karena itu, dokumentasi pengetahuan lokal dan pelibatan generasi muda menjadi penting agar pengetahuan tersebut tidak hilang.

### 3.3. Adaptasi Masyarakat

Adaptasi masyarakat terhadap banjir terlihat pada pola permukiman dan bentuk bangunan. Salah satu praktik yang ditemukan adalah pembangunan rumah panggung dengan ketinggian sekitar 2 sampai 3 meter. Rumah panggung tidak hanya dipahami sebagai warisan tradisional, tetapi juga sebagai strategi adaptasi ekologis terhadap banjir. Penentuan tinggi bangunan umumnya didasarkan pada pengalaman masyarakat terhadap tinggi muka air maksimum yang pernah terjadi. Dengan demikian, rumah panggung memiliki fungsi mitigasi struktural berbasis pengetahuan lokal.

Penggunaan material lokal seperti kayu ulin juga mencerminkan kesesuaian antara pengetahuan masyarakat dan lingkungan setempat. Rumah panggung memungkinkan aktivitas keluarga tetap berjalan ketika air naik, memudahkan penyelamatan barang, dan mengurangi risiko kerusakan pada perabot rumah tangga. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Shofwan et al. (2021) yang menunjukkan bahwa masyarakat tradisional Kampung Air Mantuil menggunakan penataan bangunan dan pola ruang sebagai strategi mitigasi banjir. Rusmaniah et al. (2025) juga menemukan penggunaan apar-apar sebagai bentuk adaptasi masyarakat Sungai Tabuk terhadap banjir.

Meski demikian, adaptasi fisik masyarakat tidak sepenuhnya mampu mengatasi seluruh risiko. Rumah panggung memiliki keterbatasan ketika debit air sangat tinggi, ketika akses jalan terputus, atau ketika masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan barang. Selain itu, tidak semua rumah memiliki desain yang sama karena kondisi ekonomi masyarakat berbeda. Oleh sebab itu, adaptasi fisik berbasis lokal perlu dikombinasikan dengan dukungan pemerintah, seperti perbaikan akses evakuasi, peta risiko desa, bantuan material yang sesuai, dan edukasi konstruksi rumah aman banjir.

### 3.4. Transformasi Nilai Lokal ke dalam Kebijakan Mitigasi

Transformasi nilai lokal berarti proses memasukkan nilai, pengetahuan, dan praktik masyarakat ke dalam kebijakan, program, dan kelembagaan formal. Di Kabupaten Barito Timur, salah satu bentuk transformasi tersebut terlihat melalui program Kawan Kades atau Kelompok Relawan Tingkat Desa. Program ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap bencana. Dalam praktiknya, Kawan Kades dapat menjadi penghubung antara pemerintah desa, BPBD, tokoh adat, dan masyarakat dalam menyampaikan informasi banjir, mengenali tanda alam, serta mengoordinasikan kegiatan mitigasi.

Program Kawan Kades menunjukkan bahwa nilai baharagu dapat diorganisasi secara lebih terstruktur. Relawan desa dapat memperkuat kegiatan gotong royong, mengingatkan masyarakat untuk menjaga sungai, membantu penyebaran informasi ketika air naik, dan mendukung sosialisasi dari BPBD. Temuan ini sejalan dengan Omoruyi et al. (2025), bahwa model mitigasi banjir yang efektif perlu mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan sistem peringatan dini formal melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Dione dan Faradina (2020) juga menunjukkan bahwa koordinasi dan informasi pembangunan daerah penting untuk meningkatkan keterpaduan antarlembaga.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan formal belum optimal. Program Kawan Kades masih menghadapi keterbatasan koordinasi, pemahaman aparatur desa, keaktifan relawan, dan dukungan anggaran. Dari sisi kelembagaan, BPBD masih lebih sering berfokus pada penanganan darurat dibandingkan pencegahan berbasis masyarakat. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2020 memang menempatkan BPBD dan Damkar sebagai perangkat daerah yang berperan dalam penanggulangan bencana, tetapi implementasi mitigasi berbasis kearifan lokal memerlukan penjabaran program yang lebih operasional. Rowa (2022) menegaskan bahwa efektivitas organisasi pemerintahan sangat bergantung pada pembagian peran, koordinasi, dan kemampuan menjalankan fungsi secara nyata. Oleh karena itu, penguatan Kawan Kades harus didukung oleh pelatihan, pedoman teknis, alokasi anggaran, serta keterlibatan tokoh adat.

Pelibatan tokoh adat menjadi penting karena kearifan lokal tidak hanya berada pada pengetahuan individu, tetapi juga melekat pada struktur sosial dan kelembagaan adat. N. A. Putri et al. (2024) menegaskan bahwa mitigasi berbasis kearifan lokal pada Kasepuhan Ciptagelar ditopang oleh pendekatan partisipatif, kelembagaan adat, dan tokoh adat sebagai penggerak utama. Dalam konteks Barito Timur, prinsip tersebut relevan untuk memperkuat hubungan antara Kawan Kades, pemerintah desa, BPBD, dan tokoh adat agar mitigasi banjir tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat. Eviany dan Sutiyo (2023) juga menekankan bahwa perlindungan masyarakat dalam manajemen kebencanaan perlu didukung oleh kesiapsiagaan, koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan Kawan Kades perlu diarahkan sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat berbasis komunitas.

Integrasi nilai lokal juga perlu masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Sinurat dan Panjaitan (2017) menjelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah menjadi sarana untuk memastikan program prioritas memperoleh dukungan sumber daya. Dalam konteks penelitian ini, penguatan mitigasi berbasis kearifan lokal dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi berbasis budaya, dokumentasi pengetahuan lokal, pelatihan relawan desa, pengelolaan sampah berbasis komunitas, pemetaan lokasi rawan banjir, dan penyusunan prosedur peringatan dini desa. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2024 dapat menjadi rujukan untuk memastikan strategi tersebut selaras dengan rencana penanggulangan bencana provinsi.

**Tabel 1.**

Ringkasan Temuan Utama Penelitian

| Dimensi | Temuan Utama | Makna Mitigasi |
|---|---|---|
| Nilai dan norma lokal | Baharagu, larangan menebang pohon di sekitar sungai, larangan membuang sampah ke sungai | Membentuk kontrol sosial dan perilaku preventif terhadap penyebab banjir |
| Pengetahuan lokal | Kemampuan membaca debit sungai, curah hujan, warna air, dan pengalaman musim banjir | Menjadi peringatan dini lokal yang melengkapi informasi formal pemerintah |
| Adaptasi masyarakat | Rumah panggung, pemilihan lokasi hunian, penggunaan material lokal | Mengurangi dampak banjir terhadap tempat tinggal dan barang masyarakat |
| Transformasi nilai lokal | Kawan Kades, sosialisasi BPBD, pelibatan pemerintah desa dan tokoh adat | Menghubungkan kearifan lokal dengan kebijakan dan program mitigasi formal |

*Sumber: Hasil pengolahan peneliti, 2026*

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Dayak Bakumpai masih memiliki fungsi nyata dalam mitigasi banjir, terutama melalui nilai kebersamaan, norma ekologis, pengetahuan tanda alam, dan adaptasi rumah panggung. Temuan ini memperkuat penelitian Obi et al. (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan lokal masyarakat pesisir dapat efektif dalam pengurangan risiko banjir apabila dipahami sebagai bagian dari sistem mitigasi. Sama halnya dengan penelitian Hadlos et al. (2022), kearifan lokal di Barito Timur menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan praktik mandiri untuk mengurangi risiko bencana sebelum bantuan formal datang.

Temuan ini juga sejalan dengan Dede et al. (2024) yang menjelaskan bahwa pengetahuan lokal Indonesia banyak muncul dalam bentuk tradisi lisan, bangunan tradisional, kelembagaan adat, dan praktik lingkungan. Di Barito Timur, bentuk tersebut tampak pada baharagu, larangan adat, rumah panggung, dan peran tokoh adat dalam menjaga norma lingkungan. Berbeda dengan penelitian Markolinda et al. (2025) yang berfokus pada masyarakat pesisir Mentawai dengan ancaman gempa, tsunami, abrasi, dan perubahan iklim, penelitian ini berfokus pada masyarakat sungai di Kalimantan Tengah dengan ancaman utama berupa banjir musiman. Perbedaan konteks ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal bersifat sangat kontekstual dan perlu disesuaikan dengan karakter ekologis wilayah.

Temuan penelitian ini juga memperkuat Omoruyi et al. (2025) yang menekankan pentingnya integrasi indigenous knowledge dengan sistem peringatan dini modern. Dalam konteks Barito Timur, Kawan Kades dapat menjadi wadah integrasi antara tanda alam yang dikenali masyarakat dan informasi formal dari BPBD. Namun, berbeda dari model ideal yang dikembangkan Omoruyi et al. (2025), integrasi di Barito Timur masih menghadapi persoalan koordinasi, kapasitas aparatur desa, dan dukungan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa model integrasi pengetahuan lokal dan modern tidak dapat berjalan hanya dengan pembentukan kelembagaan, tetapi memerlukan penguatan fungsi, pembiayaan, dan komitmen lintas sektor.

Temuan ini juga memperluas penelitian Putri (2022), Rusmaniah et al. (2025), Shofwan et al. (2021), dan Sukma et al. (2024). Penelitian ini tidak hanya menjelaskan bahwa kearifan lokal dapat digunakan untuk mitigasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai lokal mengalami tantangan ketika berhadapan dengan modernisasi, rendahnya kesadaran lingkungan, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, dan lemahnya integrasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa pemahaman bahwa keberhasilan mitigasi berbasis kearifan lokal membutuhkan kombinasi antara revitalisasi budaya, dukungan kelembagaan, perencanaan anggaran, dan koordinasi pemerintah daerah.

### 3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam penerapan mitigasi banjir berbasis kearifan lokal. Hambatan pertama adalah penurunan internalisasi nilai lokal, terutama pada generasi muda. Nilai baharagu dan larangan adat masih diketahui, tetapi tidak selalu dijalankan secara konsisten. Hambatan kedua adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai, yang diperparah oleh belum tersedianya tempat pembuangan sampah dan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat masih membuang sampah ke sungai, sehingga meningkatkan risiko penyumbatan aliran air.

Hambatan ketiga adalah belum optimalnya koordinasi kelembagaan. BPBD, pemerintah desa, relawan Kawan Kades, dan tokoh adat belum sepenuhnya bekerja dalam satu sistem mitigasi yang terintegrasi. Program yang ada masih cenderung sektoral, sementara pendekatan mitigasi berbasis kearifan lokal memerlukan kerja sama lintas sektor. Hambatan keempat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Tidak semua aparatur desa memahami

cara mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam program mitigasi, sehingga kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada sosialisasi umum dan respons ketika banjir terjadi.

Upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan formal. Pemerintah daerah perlu menyusun pedoman teknis mitigasi banjir berbasis kearifan lokal, memperkuat program Kawan Kades, melibatkan tokoh adat dalam perencanaan desa, mendokumentasikan pengetahuan lokal, serta memasukkan kegiatan edukasi lingkungan ke dalam program desa. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem peringatan dini yang menggabungkan informasi BPBD dengan tanda alam yang dipahami masyarakat. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang mendukung tata kelola risiko bencana secara berkelanjutan.

## IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mitigasi bencana banjir berbasis kearifan lokal di Kabupaten Barito Timur masih relevan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, meskipun tingkat penerapannya bervariasi. Kearifan lokal tersebut tampak melalui nilai baharagu, norma menjaga sungai dan sumber air, pengetahuan membaca tanda alam, pembangunan rumah panggung, serta transformasi nilai lokal melalui program Kawan Kades. Kearifan lokal berfungsi sebagai mitigasi non-struktural yang membantu masyarakat mencegah, mempersiapkan diri, dan mengurangi dampak banjir. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan berupa penurunan pewarisan nilai, rendahnya kesadaran lingkungan, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan dominasi pendekatan tanggap darurat. Oleh karena itu, penguatan mitigasi banjir berbasis kearifan lokal perlu dilakukan melalui integrasi kebijakan daerah, pelibatan tokoh adat, penguatan Kawan Kades, edukasi masyarakat, serta perencanaan dan penganggaran yang mendukung mitigasi berbasis komunitas.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi dan waktu penelitian. Kajian lapangan lebih banyak berfokus pada wilayah yang memiliki praktik kearifan lokal terkait banjir, sehingga belum menggambarkan seluruh variasi masyarakat di Kabupaten Barito Timur. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum mengukur tingkat efektivitas kearifan lokal secara kuantitatif.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan campuran untuk mengukur efektivitas praktik kearifan lokal terhadap penurunan risiko banjir. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan beberapa desa di sepanjang aliran sungai, mengembangkan model peringatan dini berbasis lokal, serta mengevaluasi keberlanjutan program Kawan Kades dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis masyarakat.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Desa Muara Palantau, tokoh adat, relawan Kawan Kades, dan seluruh masyarakat yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA


Anastasya, F., & Wilantika, N. (2023). Pemetaan kerawanan banjir DAS Barito tahun 2020 berdasarkan analisis regresi logistik biner. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 11*(3), 245–263. https://doi.org/10.14710/jwl.11.3.245-263

Dede, M., Kusumaningsih, S. N., Widiawaty, M. A., Nandhita, N. G. A., Wahyuni, S., Khosihan, A., Utami, N. F., Wulandari, P., Setiadi, E. M., & Ismail, A. (2024). Disaster, environment and local indigenous knowledge in Indonesia. *E3S Web of Conferences, 600*, Article 02001. https://www.researchgate.net/publication/386244900_Disaster_environment_and_local_indigenous_knowledge_in_Indonesia

Dione, F., & Faradina, U. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in increasing coordination of regional development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 3*(1), 21–28. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan manajemen kebencanaan*. Nasmedia.

Hadlos, A., Opdyke, A., & Hadigheh, S. A. (2022). Where does local and indigenous knowledge in disaster risk reduction go from here? A systematic literature review. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 79*, Article 103160. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103160

Khairi, H. (n.d.). Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah pasca reformasi. Dalam *Otonomi daerah: Refleksi dan kritik*. Kompas. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/860/

Labolo, M. (2017). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya* (Cet. 8). Rajawali Pers.

Markolinda, Y., Sawirman, S., Ramadani, M., Yusya, F., Husna, N., Azmi, F., Surya, R. F., Taufiqurrahman, R. A., & Panjaitan, M. L. D. B. (2025). Indigenous knowledge for disaster mitigation and climate threats in Mentawai, Indonesia. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 17*(1), Article a1877. https://doi.org/10.4102/jamba.v17i1.1877

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Novrianti, N., Azhari, M., & Marlina, S. (2019). Mitigasi pencegahan bencana lingkungan Kalimantan Tengah dengan meningkatkan peran kearifan lokal dan pendidikan yang berwawasan lingkungan. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan, 4*(1), 1–4. https://doi.org/10.33084/mitl.v4i1.647

Obi, R., Nwachukwu, M. U., Okeke, D. C., & Jiburum, U. (2021). Indigenous flood control and management knowledge and flood disaster risk reduction in Nigeria's coastal communities: An empirical analysis. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 55*, Article 102079. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102079

Omoruyi, U., Nzewi, O., & Mpofu, V. (2025). A collaborative integrated Indigenous knowledge-based flood risk reduction model. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 17*(1), Article a1913. https://doi.org/10.4102/jamba.v17i1.1913

Pemerintah Kabupaten Barito Timur. (2020). *Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur*.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). *Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029*.

Putri, A. (2022). Mitigasi bencana berbasis kearifan lokal: Local knowledge, local wisdom, dan local genius. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi, 6*(1), 89–98. https://doi.org/10.29408/geodika.v6i1.5417

Putri, N. A., Sutiyo, S., Ristiani, I. Y., Supriatna, A., & Uluputty, I. (2024). Mitigasi bencana berbasis kearifan lokal pada masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 9*(1), 65-82. https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.65-82

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*.

Rowa, H. (2022). *Organisasi pemerintahan dalam perspektif teori dan praktek*. CV Rtujuuh Mediaprinting.

Rusmaniah, R., Arisanty, D., Abbas, E. W., & Angriani, P. (2025). Kearifan lokal masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Sungai Tabuk. *Anterior Jurnal, 24*(1), 1–9. https://doi.org/10.33084/anterior.v24i1.8399

Shofwan, M., Nugroho, A. R., Prasakti, Y., Fitria, N. N., & Azmi, L. (2021). Mitigasi bencana pada masyarakat tradisional Kampung Air Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin. *Jurnal Geografika: Geografi Lingkungan Lahan Basah, 2*(2), 79–87. https://doi.org/10.20527/jgp.v2i2.5011

Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2017). *Perencanaan dan penganggaran daerah*. Pustaka Rahmat.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sukma, D. A. A., Sudibyo, E., Rahayuningsih, W., & Nugraheni, F. (2024). Kajian literatur: Mitigasi bencana banjir berbasis kearifan lokal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1*(4), 257–269. https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/1186

Taufan, A. (2023). *Kearifan lokal (local wisdom) Indonesia*. Widina Media Utama.